



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH  
( L K P J )  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) LUBUK SIKAPING  
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2018

RSUD LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN

TAHUN 2019

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping Tahun 2018, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021.

Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan pedoman bagi RSUD Lubuk Sikaping terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pasaman kedepan.

Lubuk Sikaping, Januari 2019

DIREKTUR

TTD

dr Yong Marzuhaili

Nip.19740928 200604 1 009

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Dasar Hukum SKPD**

Peraturan yang mendasari pelaksanaan tupoksi, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Lubuk Sikaping :

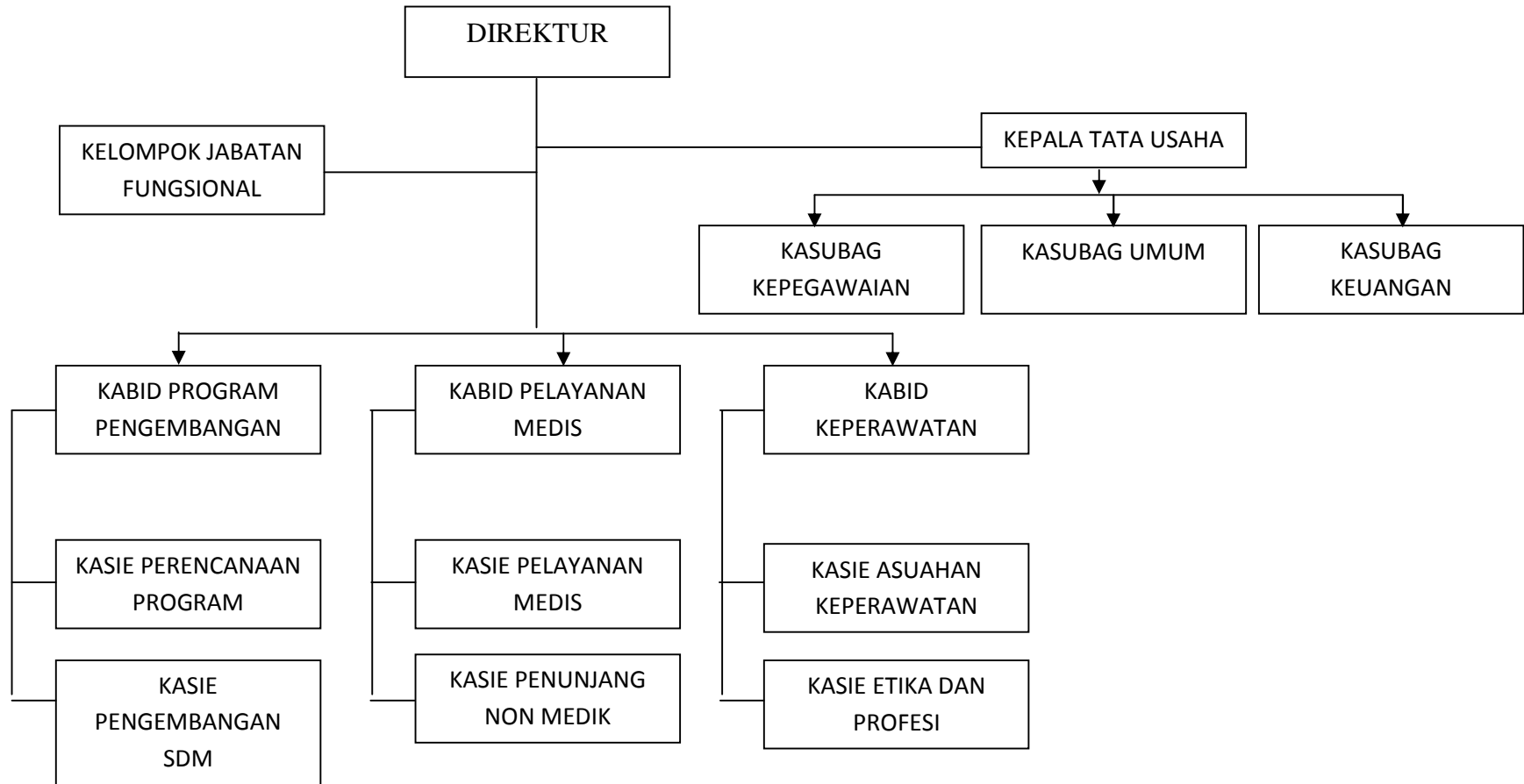
1. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Daerah tahun 2009 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan (ILPPD) kepada Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman

## **B. Gambaran Umum SKPD**

### **a. Struktur Organisasi**

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Bupati Pasaman nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, maka Struktur Organisasi RSUD Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR RSUD LUBUK SIKAPING  
KABUPATEN PASAMAN**



Direktur RSUD Lubuk Sikaping – Kabupaten Pasaman dibantu oleh jajaran struktural yakni :

**a. Kabag. TU, membawahi :**

- 1) Sub Bagian Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

**b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahi :**

- 1) Seksi Perencanaan Program
- 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya

**c. Bidang Pelayanan Medis, membawahi :**

- 1) Seksi Pelayanan Medis
- 2) Seksi Penunjang Medis

**d. Bidang Keperawatan, membawahi :**

- 1) Seksi Asuhan Keperawatan
- 2) Seksi Etika Profesi Keperawatan

Dan jajaran fungsional yang dibentuk dalam suatu instalasi yang terdiri dari :

1. Instalasi Radiologi
2. Instalasi Farmasi
3. Instalasi Laboratorium
4. Instalasi Gizi
5. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (Sanitasi, Listrik, Bangunan)
6. Instalasi Pemeliharaan Sarana Medik
7. Instalasi Rekam Medik
8. Instalasi Rehabilitasi Medik ( Fisioterapi )

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 65 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Rumah Sakit Lubuk Sikaping, maka secara jelas digariskan bahwa tugas pokok dan fungsinya adalah :

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pengembangan rumah sakit.
2. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dibidang keperawatan dan pelayanan medis.
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan pelayanan kesehatan.
4. Pembinaan dan pelaksanaan dukungan tugas dibidang urusan pelayanan kesehatan.
5. Pelayanan dan rekam medis.
6. Pelayanan asuhan kesehatan.
7. Pelayanan kesehatan rujukan.
8. Pelayanan pelaksanaan tugas medis dan rekam medis.
9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
10. Pengelolaan Administrasi dan keuangan.
11. Pemeliharaan sarana dan prasarana.
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas.

c. Kepegawaian

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Lubuk Sikaping didukung dengan sumber daya manusia yang berjumlah sebanyak 344 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**DATA KEPEGAWAIAN RSUD LUBUK SIKAPING TAHUN 2018**

No	Jabatan	Pendidikan	Golongan				Tenaga Honor / Kontrak		Jenis Kelamin		Jumlah
			IV	III	II	I	HONDA	KONTRAK	L	P	
1	Dokter Spesialis	S2 Kedokteran	4	7	-	-	-	2	5	8	13
2	Dokter Umum	S1 Kedokteran	3	3	-	-	-	8	3	11	14
3	Dokter Gigi	S1 Kedokteran	2	-	-	-	-	1	-	2	2
4	Megister Kesehatan	S2 Kesehatan masyarakat	-	1	-	-	-	-	-	1	1
5	Megister Saint	S2 Kesehatan Lingkungan	-	1	-	-	-	-	-	1	1
6	Apoteker	S1 Farmasi	1	2	-	-	-	2	-	5	5
7	Administrator/Sanitasi	S1 Kesehatan Masyarakat	1	7	-	-	-	1	3	6	9
8	Perawat Ahli	S1 Keperawatan	2	23	-	-	-	9	8	26	34
9	Perawat Terampil	D III Keperawatan	-	41	8	-	8	15	6	66	72
10	Bidan	D III & D1 Kebidanan	-	8	3	-	-	17	-	28	28
11	Anastesi	D III Anastesi	-	-	2	-	-	1	1	3	3
12	Fisioterapi	D IV & D III Fisioterapi	-	6	-	-	-	1	3	7	7
13	Radiografer	D IV & D III Radiologi	-	1	-	-	-	3	-	3	4
14	Rekam Medis	D III Apikes	-	4	-	-	-	6	-	7	10
15	Nutrision	D IV & D III Gizi	-	7	-	-	-	1	-	8	8
16	Asisten Apoteker	D III & SMF	-	5	4	-	-	6	-	15	15
17	Sanitasi	D III Sanitarian	-	-	-	-	-	3	-	3	3
18	Elektro Medis	S1 / D III ATEM	-	1	-	-	-	1	1	1	2
19	Komputer	S1 / D III Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Verifikator Keuangan	S1 / D III Akuntansi	-	1	1	-	-	-	-	2	2
21	Analisis Keuangan	D III Analisis & SMAK	-	5	-	-	-	4	-	9	9
22	Perawat Gigi	D III Gigi & SPRG	-	5	1	-	-	-	1	5	6
23	Perawat Mata	D III Refraksi	-	2	-	-	-	2	1	3	4
24	Satpam	SMA	-	-	2	-	-	6	8	-	8
25	Sopir	SMA & SMP	-	2	4	-	-	5	11	-	11
26	Pramu Kantor	SMA & SMP	-	-	3	-	-	1	-	4	4
27	Petugas Kebersihan	SMA/SMP/SD	-	-	1	2	1	-	2	2	4
28	Juru Masak	SMA/SMP/SD	-	-	7	-	-	4	-	11	11
29	Loundry	SMP	-	-	1	-	-	6	-	7	7
30	Pengumpul dan Pengolah Data	SMK & SMA	-	2	1	-	1	9	5	20	25
31	Teknisi Khusus	STM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Non Kesehatan	S1 Agama /SMA/SMP/S D	-	-	4	-	2	16	10	12	22
			12	133	5	2	12	130	69	275	344

Ket :

1. PNS : 202 orang
2. Jenis Kelamin : LK 69 orang dan Pr 275 orang
3. Golongan : IV = 12 orang, III = 133 orang, II = 55 orang, I = 2 orang
4. Honor Daerah : 12 orang
5. Kontrak : 130 orang

**Tabel 1.2**

**Rekapitulasi Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional Golongan/Pangkat dan Pendidikan**

No	NAMA	L/ P	JABATAN	GOL/ PANGKAT	PENDIDIKAN	DIKLAT KEPEMIMP INAN YANG TELAH DIKUTI
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>STRUKTURAL</b>					
<b>I</b>	<b>DIREKTUR RSUD LUBUK SIKAPING</b>					
1	Dr. Yong Marzuhaili	L	Direktur	III D / Penata Tk. I	S1 Kedokteran	
<b>II</b>	<b>BAGIAN TATA USAHA</b>					
1	Hj. Ida Trisna, SKM	P	Kabag Tata Usaha	IIId/ Penata Tingkat I	S1 Kesehatan Masyarakat	Diklat PIM IV
2	Elva Vera, SH	P	Kasubag Kepegawaian	IIId/ Penata Tingkat I	S1 Hukum	
3	Indria Warni	P	Kasubag Umum dan Perlengkapan	IIId/ Penata Tingkat I	SLTA	
4	Yossi Nasution,SE	P	Kasubag Keuangan	IIIc/ Penata	S1 Ekonomi	Diklat PIM IV
<b>III</b>	<b>BIDANG PERENCANAAN</b>					
1	Eva Gusriani, SKM	P	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	IIId/ Penata Tk I	S1 Kesehatan Masyarakat	Diklat PIM IV
2	Junialdi Hendra, SKM	L	Kasi Perencanaan dan Program	IIId/ Penata Tk. I	S1 Kesehatan Masyarakat	
3	Ratih Anggun Dewi, SKM, MPH	P	Kasi Pengembangan Sumber Daya	IIIc/ Penata	S2 Kesehatan Masyarakat	
<b>IV</b>	<b>BIDANG PELAYANAN MEDIS</b>					
1	Dr. Rahadian Suryanta	L	Kabid Pelayanan Medis	IIIc/ Penata	S1 Kedokteran	
2	dr Helvi Yeriza	P	Kasi Pelayanan Medis	IIId/ Penata Tk I	S1 Kedokteran	
3	Madinasari, S,Si, Apt	P	Kasi Penunjang Medis	IIIc/ Penata	S1 Keperawatan	
<b>V</b>	<b>BIDANG KEPERAWATAN</b>					
1	Asliza, SKM, MSi		Kabid Keperawatan	IIId/ Penata Tk I	S2 Manajemen Lingkungan	



2	Ns. Isnadi Agus, S.Kep	P	Kasi Askep	IIIc/ Penata	S1 Keperawatan	
3	Ns. Ostia Fitri, S.Kep	P	Kasi Pelayanan Medis	IIIId/ Penata Tk I	S1 Keperawatan	
<b>B</b>	<b>FUNGSIONAL</b>  187 orang yang terdiri dari fungsional Kesehatan dan fungsional Umum					

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH**

#### A. Visi dan Misi SKPD

1. Visi RSUD Lubuk Sikaping adalah

**Menjadikan Rumah Sakit yang dipercaya dan bermutu dengan mengutamakan kepuasan pasien**

2. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan misi yang harus dilaksanakan adalah

- a) Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu, profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien
- b) Menjadikan rumah sakit yang bersih, nyaman dan berwawasan lingkungan
- c) Menciptakan budaya petugas yang ramah dan murah senyum serta dapat memberikan informasi yang sesuai kebutuhan pasien
- d) Meningkatkan dan memelihara sarana, prasarana dan peralatan disertai ketersediaan petugas yang kompeten dibidangnya
- e) Mengoptimalkan manajemen rumah sakit dengan pengelolaan administrasi yang cepat, akurat, dan sesuai standar
- f) Mengembangkan potensi, kompetensi, etos dan budaya kerja SDM rumah sakit yang selalu siap menghadapi perubahan
- g) Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan efisien sehingga staf puas

3. Motto dan Janji Pelayanan RSUD Lubuk Sikaping

Adapun Motto RSUD adalah

**“ Karena anda kami ada, dengan ikhlas kami bekerja, satu senyum untuk semua “**

Sedangkan untuk janji pelayanan adalah

**“ Kepuasan anda adalah kebahagiaan kami “**

#### 4. Tujuan RSUD Lubuk Sikaping

Hasil yang akan dicapai RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman 2016-2021 yang dilatarbelakangi dalam upaya mewujudkan visi RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yaitu “ **Menjadikan Rumah Sakit yang dipercaya dan bermutu dengan mengutamakan kepuasan pasien** “. Adapun tujuan yang akan dicapai RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021 ) dijabarkan untuk sebagai berikut:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan organisasi

#### B. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Rumusan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran lima tahunan RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman akan dicapai selanjutnya dirumuskan dalam bentuk strategi. Adapun strategi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 1 ( Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat )

1. melakukan survei indeks kepuasan masyarakat bagi pengunjung rumah sakit secara berkala
2. melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal (SPM)

Tujuan 2 ( Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan tata kelola organisasi )

1. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi
2. Meningkatkan sarana prasarana
3. Meningkatkan kompetensi SDM RS
4. meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan RS

Untuk mendukung impementasi strategi secara optimal maka dirumuskan kebijakan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan

program dan kegiatan lima tahunan RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Adapun strategi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 1 ( Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat )

1. Pengembangan hasil IKM / SPM untuk pedoman perencanaan program dan kegiatan
2. Peningkatan kualitas pelayanan melalui pelaksanaan SPM Rujukan dalam pelayanan kesehatan melalui SK Bupati.

Tujuan 2 ( Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan RS)

1. mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi dalam menyusun perencanaan
2. berpedoman peraturan terkait sarana prasarana rumah sakit
3. melakukan pendataan dan mengikuti pelatihan-pelatihan bagi SDM RS dalam meningkatkan kompetensinya
4. mengoptimalkan penerapan SOP akuntabilitas dalam melaksanakan kegiatan

### C. Prioritas SKPD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada RSUD Lubuk Sikaping Tahun 201 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Program dan Kegiatan RSUD Lubuk Sikaping**

PROGRAM	KEGIATAN
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Kegiatan Administrasi Perkantoran
II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Aparatur
III. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3. Kegiatan Penyusunan Laporan SKPD
IV. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	4. Kegiatan akreditasi RS 5. Kegiatan pelaksanaan Akreditasi
V. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	6. Fasilitas Pelaksana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
VI. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ RS. Paru/ RS. Mata.	7. Kegiatan DAK Bidang Pelayanan Rujukan

**BAB III**  
**KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah (PAD) SKPD

1. Target dan Realisasi

Dari pendapatan asli daerah (PAD), RSUD Lubuk Sikaping memiliki target PAD tahun 2018 sebesar Rp. 64.000.000.000 dengan realisasi keadaan desember Rp. 54.310.205.252 secara persentase sebesar 85%. Dalam kegiatan tersebut meliputi hasil retribusi daerah dan sewa rumah dinas dll.

2. Permasalahan dan Solusi

Dalam penerimaan PAD tidak ada ditemui permasalahan dan dapat terlaksana dengan baik.

B. Pengelolaan Belanja Daerah SKPD

1. Target dan Realisasi

a. Belanja Tidak Langsung

- a. Alokasi anggaran Rp. 17.603.646.020
- b. Realisasi anggaran Rp. 17.001.176.304
- c. Sisa lebih anggaran Rp. 602.469.716

b. Belanja Langsung (BLUD)

- a. Alokasi anggaran Rp. 64.000.000.000
- b. Realisasi anggaran Rp. 54.310.205.252
- c. Sisa lebih anggaran Rp. 9.628.188.298

2. Permasalahan dan Solusi

Secara umum tidak ditemui kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018, dalam anggaran perubahan RSUD Lubuk Sikaping mendapat penambahan anggaran untuk pelaksanaan akreditasi sebesar Rp 1.500.000.000. dan dapat direalisasikan. Disamping itu karena jumlah anggaran yang relatif terbatas maka solusi penerapan prinsip efisiensi berdasarkan skala prioritas harus dilaksanakan dalam merealisasikan anggaran.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

#### A. Urusan wajib yang dilaksanakan

- a. Bidang kesehatan yang di danai melalui dana APBD dan BLUD

#### B. Dengan rincian sebagai berikut :

##### a. Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah

1. Program Administrasi Perkantoran
  - Kegiatan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - Kegiatan pengadaan pakaian aparat
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Kegiatan penyusunan laporan-laporan SKPD
4. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
  - Kegiatan akreditasi RS (DAK Non Fisik)
  - Kegiatan pelaksanaan akreditasi RS (APBD)
5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
  - Kegiatan fasilitasi pelaksanaan badan layanan umum daerah
6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS Paru/RS Paru
  - Kegiatan DAK bidang pelayanan rujukan

##### b. Realisasi Program dan Kegiatan

Adapun realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah

1. Program Administrasi Perkantoran
  - Kegiatan administrasi perkantoran  
Telah terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran yang merupakan indikator dari kegiatan administrasi perkantoran dengan pagu dana yang dianggarkan pada tahun 2018 adalah Rp. 3.037.950.000 dan terserap sebesar Rp. 2.599.537.500,- (86%). Kegiatan ini meliputi : Belanja honorarium PNS dan Non PNS, belanja telepon, air, listrik, kontrak dokter spesialis. Untuk kegiatan ini sisa anggaran sebesar Rp. 438.412.500. hal ini dikarenakan keterlambatan pengesahan anggaran perubahan sehingga honor tenaga kontrak hanya 1

(satu) bulan yang terbayarkan. Dan tidak datangnya dokter spesialis PPDS dari Kemkes RI dimana gajinya sudah dianggarkan.

## 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan pengadaan pakaian aparatur

Tersedianya jumlah pakaian aparatur yang merupakan indikator dari kegiatan pengadaan pakaian aparatur alokasi dana anggaran untuk kegiatan ini pada tahun 2018 adalah Rp. 144.000.000,- dan terserap sebesar Rp. 142.100.000,- (99%). Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan pakaian dinas harian, pengadaan pakaian satpam dan pengadaan pakaian olah raga. Dengan pengadaan pakaian aparatur akan meningkatkan semangat aparatur dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

## 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan penyusunan laporan-laporan SKPD

Kegiatan yang dilakukan dalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan berorientasi untuk satu kegiatan inti yaitu penyusunan Laporan SKPD Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 6.000.000,-, dengan menyerap Rp. 6.000.000,- (100%) . Secara fisik target kinerja untuk kegiatan ini 100%. Artinya seluruh kegiatan yang direncanakan dapat terlaksanan dengan baik dan tersedianya laporan dari setiap kegiatan.

## 4. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- Kegiatan akreditasi RS dan pelaksanaan akreditasi RS

Kegiatan ini mencakup belanja ATK, belanja bahan material, belanja cetak dan pengglanja penggantian transport dan akomodasi , belanja makan dan minum dan belanja rehabilitasi bangunan. Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar :

- a. Akreditas RS melalui dana DAK Rp. 570.000.000 dengan serapan dana sebesar Rp. 441.304.600 (77,4%)

- b. Pelaksanaan akreditasi Rp. 1.500.000.000 dengan serapan dana sebesar Rp. 1.089.851.624 (73%). secara umum kendala yang ditemui adalah ketidak sesuaian cost biaya DAK dengan APBD. dan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan rehabilitasi bangunan.
5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- Kegiatan fasilitasi pelaksanaan badan layanan umum daerah  
Tersedianya belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, dan belanja pengadaan peralatan dan mesin. yang mempunyai anggaran sebesar Rp. 64.000.000.000,- dan terserap sebesar Rp. 54.310.205.252,- (85%). kendala yang ditemui keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan. Dalam kegiatan BLUD ini RSUD dapat mengelola anggaran sendiri sesuai dengan kebutuhan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat.
6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS Paru/RS Paru
- Kegiatan DAK bidang pelayanan rujukan  
Terlaksananya DAK Bidang pelayanan rujukan dana yang dianggarkan Rp. 7.665.721.000,-. Dan dana yang terserap sebesar Rp. 6.933.355.234,- (90,4%). Secara fisik kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

**Tabel 3.1**

**Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja (Indikator Sasaran Renstra SKPD Tahun 2018 (Urusan Wajib Kesehatan RSUD Lubuk Sikaping)**

<b>Sasaran Strategis 1.</b> Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai standar				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	70	100%
2.	Tingkat Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	Paripurna



<b>Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit</b>				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Evaluasi Sakip	B	B	B
2.	Persentase kepatuhan pelaksanaan undang-undang pelayanan publik	70	70	100%

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib**  
**RSUD Lubuk Sikaping Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja sesuai RENSTRA (5 Tahun)</b>	<b>Pencapaian Kinerja Tahun 2017</b>	<b>Pencapaian Kinerja Tahun 2018</b>
1	Nilai IKM / SPM	100	65	72
2	Tingkat Akreditasi	Paripurna	Dasar	Paripurna
3	Nilai evaluasi SAKIP	A	C	B
4	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik	100	65	70

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut permasalahan yang ditemui dan solusinya :

a. Kegiatan administrasi perkantoran

Ditemui keterlambatan pengesahan anggaran APBD Perubahan yang mengakibatkan hanya 1 (satu) bulan terealisasi honor tenaga kontrak. Dan tidak datangnya dokter spesialis dari PPDS Kemkes RI dimana honorinya telah dianggarkan.

Solusinya kedepan agar percepatan pengesahan APBD Perubahan pada tahun berjalan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta meminta

kepastian tenaga medis PPDS dari Kemkes RI untuk RSUD Lubuk Sikaping.

b. Pengadaan obat dan BMHP e-catalog

Ditemui lamanya waktu pengadaan obat /BMHP melalui e-purchasing, mulai dari pemesanan sampai obat/BMHP diterima. Adanya penolakan dari penyedia karena ketidaksanggupan distributor dalam memenuhi permintaan terutama proses e-purchasing serta keterbatasan bahan baku obat/BMHP sulitnya terpenuhi permintaan.

Solusinya dikarenakan waktu lama dalam proses pengadaan maka pembelian obat/BMHP dilakukan secara manual karena obat /BMHP menyangkut hajat hidup masyarakat dan sifatnya segera maka harus dipenuhi. Kuantitas obat yang tidak mencukupi dari permintaan maka untuk memenuhi kekurangannya dilakukan pembelian secara manual.

c. Jasa pelayanan BPJS

Target pembayaran Jasa Pelayanan BPJS yang direncanakan 11 (sebelas) Bulan namun hanya terealisasi 8 (delapan) bulan, hal ini dikarenakan terlambatan pembayaran klem BPJS ke RSUD pada tahun 2018.

Solusinya melaksanakan denda sesuai kesepakatan yang telah dituangkan dalam MOU RSUD dengan BPJS.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

**A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**

**1. Dasar Hukum**

(Tidak ada)

**2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

(Tidak Ada)

**3. Satuan Kerja Daerah yang Melaksanakan**

(Tidak Ada)

**4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya**

(Tidak Ada)

**5. Sumber dan Jumlah Anggaran**

(Tidak Ada)

**6. Permasalahan Dan Solusi**

(Tidak Ada)

**7. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

(Tidak Ada)

**B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN**

**1. Dasar Hukum**

(Tidak Ada)

**2. Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan kepada Kabupaten/ Kota dan Desa/Nagari**

(Tidak Ada)

**3. Sumber dan Jumlah Anggaran**

(Tidak Ada)

**4. Sarana dan Prasarana**

(Tidak Ada)

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### **A. KERJASAMA ANTAR DAERAH**

**1. Kebijakan dan Kegiatan**

(Tidak Ada)

**2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

(Tidak Ada)

**3. Permasalahan dan Solusi**

(Tidak Ada)

#### **B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KE TIGA**

Adapun kerjasama yang dilakukan RSUD dengan pihak ke tiga berupa MOU dengan pihak akademis (perguruan tinggi). Kegiatan yang dilaksanakan berupa pendidikan dan pelatihan, praktek lapangan dan praktek workshop. Adapun perguruan tinggi yang mengadakan kerjasama dengan RSUD Lubuk Sikaping adalah

1. Universitas Andalas Padang (2017-2018)
2. STIKES for de Kock Bukittinggi (2012-2019)
3. STIKER Perintis Sumbar (2015-2020)
4. STIKES Prima Nusantara Bukittinggi (2017-2020)
5. Politeknik Kemenkes Padang (2014-2019)

#### **C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH**

**1. Kebijakan dan Kegiatan**

(Tidak Ada)

**2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

(Tidak Ada)

**3. Permasalahan dan Solusi**

(Tidak Ada)

#### **D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH**

**1. Kebijakan dan Kegiatan**

(Tidak Ada)

**2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

(Tidak Ada)

**3. Permasalahan dan Solusi**

(Tidak Ada)

**E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA (*HANYA DILAPORAKAN OLEH BAGIAN BPBD*)**

**F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS**

**1. Jenis Kawasan Khusus**

(Tidak Ada)

**2. Sumber Anggaran**

(Tidak Ada)

**3. Permasalahan Yang Dihadapi dan Solusi**

(Tidak Ada)

**G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (*HANYA DILAPORKAN OLEH KANTOR SATPOL PP DAN KANTOR KESBANGPOL*)**

**1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis Sara, Anarkisme, Separatisme Atau Lainnya)**

(Tidak Ada)

**2. SKPD Yang Menangani Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

(Tidak Ada)

**3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan**

(Tidak Ada)

**4. Penanggulangan Dan Kendalanya**

(Tidak Ada)

**5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan**

(Tidak Ada)

**6. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

(Tidak Ada)

## **BAB VII PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penyampaian Laporan pertanggungjawaban, yang dalam hal ini disebut dengan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Pasaman adalah wujud dari akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah tidak terkecuali pada RSUD Lubuk Sikaping, yang nantinya akan dievaluasi dan dikritikisasi oleh masyarakat yang dalam hal ini oleh DPRD Kabupaten Pasaman.

Dilihat dari capaian indikator kinerja yang dilaksanakan (tertuang dalam renstra RSUD Lubuk Sikaping) dapat dilaksanakan dengan baik. Walaupun ditemui beberapa kendala namun tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Pasaman, kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak ketiga telah diupayakan demi terwujudnya visi dan misi RSUD Lubuk Sikaping. Kedepan diharapkan RSUD Lubuk Sikaping menjadi rumah sakit yang terakreditasi sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

### **B. Saran**

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia baik melalui bimtek, seminar atau sejenisnya untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
2. Upaya meningkatkan potensi daerah yang terbatas dengan cara :
  - 1) Mengadakan pengkajian dan penelitian yang ada kaitannya dengan potensi RSUD Lubuk Sikaping
  - 2) Mengintensifkan Potensi sumber daya manusia dan yang ada
  - 3) Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan eksternal dengan penetapan sistem pelayanan minimal.

- 4) Melakukan konsultasi, rapat-rapat koordinasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya untuk perkembangan RSUD Lubuk Sikaping ke depan
- 5) Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.
- 6) Diharapkan dukungan pemerintah daerah dalam memprioritaskan pembangunan rumah sakit baik dari segi sarana dan prasarana rumah sakit demi terwujudnya rumah sakit yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan bermutu.